

**Analisis Kualitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun
2017-2021**

Abidin Tatroman¹, Kismon Monierdin¹, Kumba Digdowiseiso¹

¹Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id, abibatroman2022@gmail.com,

kmonierdin@gmail.com

ABSTRACT.

The quality of the Maluku Province's financial performance is measured by the degree of decentralization ratio showing the low financial performance of the Maluku Province in 2017-2021 out of a total count of eleven city districts. If you calculate the total average value of the degree of decentralization ratio for 2017-2021 Maluku Province is 4.09%. This figure illustrates that the quality of Maluku Province's financial performance is very low in the 2017-2021 period. The financial independence ratio of Maluku Province is instructive with the average percentage of districts/cities below 25%, meaning that Maluku Province's dependence on central government assistance is quite large for financing regional development. The regional financial effectiveness ratio of Maluku Province is in the category of ineffective regional financial performance. Of the eleven regencies/cities of Maluku Province, only five regencies/cities are categorized as effectively balanced, but the 2017-2018 period is not complete for the 2017-2021 period. The accumulative total analysis shows that Maluku Province is classified as an ineffective regional financial province.

Keywords: Quality of financial performance; Maluku Province.

ABSTRAK.

Kualitas kinerja keuangan Provinsi Maluku diukur dengan rasio derajat desentralisasi menunjukkan rendahnya kinerja keuangan Provinsi Maluku pada tahun 2017-2021 dari total hitungan sebelas kabupaten kota. Jika dihitung total nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi tahun 2017-2021 Provinsi Maluku adalah sebesar 4,09%. Angka ini menggambarkan kualitas kinerja keuangan Provinsi Maluku sangat rendah pada periode 2017-2021. Rasio kemandirian keuangan Provinsi Maluku sifatnya instruktif dengan presentase nilai rata-rata kabupaten/kota dibawah 25%, artinya ketergantungan Provinsi Maluku dengan bantuan pemerintah pusat cukup besar untuk pembiayaan pembangunan daerah. Rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi Maluku dengan kategori tidak efektif kinerja keuangan daerah. Dari sebelas kabupaen/kota Provinsi Maluku hanya lima kabupaten/kota yang masuk kategori efektif berimbang, tetapi periodenya 2017-2018, tidak utuh kurun waktu 2017-2021. Akumulatif dari total analisis menunjukkan Provinsi Maluku tergolong Provinsi tidak efektif keuangan daerahnya.

Kata kunci: Kualitas kinerja keuangan; Provinsi Maluku.

PENDAHULUAN

Kemandirian pemerintah daerah dapat dilihat sejauhmana kemampuan pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk peningkatan pendapatan asli daerah (Bastian 2001:8) Provinsi Maluku adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari sebelas kabupaten/kota yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dari data BPS yang dirilis pada tahun 2021 bahwa trand

angka kemiskinan Provinsi Maluku dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Provinsi Maluku adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori provinsi termiskin di Indonesia. Peran pemerintah Provinsi Maluku dalam peningkatan pendapatan daerah masih jauh dari harapan publik Maluku, hal ini terlihat dari statistik keuangan Maluku yang masih tergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Problem dasar yang dihadapi provinsi Maluku dari tahun 2017-2021 adalah ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat, sehingga kemandirian mengelola sumber daya alam di Maluku belum maksimal menopang pendapatan asli daerah. Ketergantungan provinsi Maluku pada dana transfer pusat dilihat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sebelas kabupaten/kota yang mengandalkan bantuan pemerintah pusat ketimbang menjalankan otonomi daerah yang unsur utamanya adalah menciptakan kemandirian daerah dalam sektor ekonomi. Otonomi daerah seharusnya menciptakan kemandirian keuangan daerah, tetapi pemerintah Provinsi Maluku sebaliknya masih menggantungkan anggaran pada pemerintah pusat lewat dana perimbangan. Mardiasmo (2009) pengukuran kinerja adalah membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pada tahun 2017-2021 merilis data tentang keuangan Provinsi Maluku dengan memperlihatkan kinerja keuangan Provinsi Maluku yang masuk dalam kategori Provinsi yang rendah serapan PAD. Sedangkan disisi lain, kekayaan sumber daya alam Provinsi Maluku melimpah baik di laut maupun darat. Mahmudi (2020) laporan keuangan daerah sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah secara seluruhan dan unit-unit didalamnya. Halim (2007) bahwa kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai tugas-tugas pemerintah dalam konteks pembangunan dan pelayanan publik.

Analisis kualitas kinerja keuangan pemerintah Provinsi Maluku menggunakan data yang disajikan bentuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2017-2021. Dengan demikian, maka mendapatkan satu penjelasan utuh terhadap keuangan Provinsi Maluku. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2007). Provinsi Maluku dengan Luas wilayah sebesar 712.479 kilometer persegi dengan luas daratan 54.185 kilometer persegi atau sebanyak 7,6 persen dan luas lautan 658.294 kilometer persegi atau 92,4 persen. Sedangkan jumlah penduduk Maluku sesuai dengan data BPS pada 2020 sebesar 1.848,92 ribu jiwa. Kekayaan alam yang melimpah tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya, sehingga provinsi Maluku masih terbelakang, tertinggal dan termiskin di Indonesia. Akses ekonomi sulit didapatkan oleh masyarakat, lapangan kerja yang sulit di Maluku, akses pendidikan

yang masih memperlihatkan GAP antara kaya dan miskin. Semua problem dasar ini, seharusnya Provinsi Maluku menyadari dan meningkatkan PAD lewat eksplorasi kekayaan alam Provinsi Maluku, ketimbang berharap pada dana transfer pemerintah pusat.

Berdasarkan pencarian ilmiah pada pangkalan data google scholar dengan kata kunci “kualitas kinerja keuangan daerah Maluku” dengan rentan waktu 2017-2021 belum ditemukan penelitian spesifik meneliti tentang kualitas kinerja keuangan Provinsi Maluku tahun 2017-2021. Atas dasar ini, penelitian ini urgen untuk menjawab kebutuhan analisis kualitas kinerja keuangan Provinsi Maluku 2017-2021. Orisinalitas dalam penelitian ini dijamin.

Sedangkan tujuan dari penelitian adalah menganalisis kualitas kinerja keuangan Provinsi Maluku pada periode 2017-2021 dengan data realisasi APBD kabupaten/kota Provinsi Maluku dengan menggunakan analisis derajat kemandirian, rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi PAD, rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja.

Menurut Mamesah dalam Halim (2008,h.23-25) bahwa semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian dengan sesuatu berupa uang maupun barang yang menjadi kekayaan pemerintah daerah dan belum dikuasai oleh pemerintah pusat dengan ketentuan undang-undang, dapat dikategorikan sebagai keuangan daerah. Halim (2009, h.119) prinsip pengelolaan keuangan daerah memenuhi transparansi, akuntabilitas, dan value for money (ekonomis, efektif, dan efisien). Analisis kualitas kinerja keuangan Provinsi Maluku didasarkan atas laporan realisasi APBD pada sebelas kabupaten/kota Provinsi Maluku. Analisis tersebut sesuai dengan data yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) periode 2017-2021 sebelas kabupaten/kota Provinsi Maluku. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah instrumen pengendalian, evaluasi pada kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh dan unit-unit di dalamnya (Mahmudi, 2010). Kesehatan keuangan pemerintah daerah dinilai dengan menganalisis rasio keuangan sesuai dengan laporan keuangan daerah (Susanto, 2015).

Bastian (2001:8) keuangan daerah berkaitan erat dengan keuangan negara yang merupakan pengelolaan keuangan daerah. Munir, Djuanda, Tangkilisan (2004:7) yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah mengatur keuangan daerah tersebut dengan prinsip: (1) tanggung jawab, (2) mampu memenuhi kewajiban keuangan (3) kejujuran, (4) hasil guna dan daya guna dan (5) pengendalian. Pemerintah Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2017-2021 dikategorikan provinsi yang masih tergantung pada keuangan pemerintah pusat dengan dilihat dari statistik keuangan provinsi Maluku periode 2017-2021. Data tersebut disajikan, dipublikasi dengan memperlihatkan adanya ketergantungan yang cukup besar pada pemerintah pusat. Nafarin (2012) menyebutkan anggaran sebagai rencana yang sifatnya tertulis mengenai kegiatan organisasi secara kuantitatif dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Anggaran sebagai rencana operasional keuangan yang meliputi pengeluaran yang diusulkan, sumber pendapatan yang diharapkan membiayai kurun waktu periode tertentu (Julita, Jufrizen, dan Sintong, 2014).

Untuk menganalisis kualitas kinerja keuangan Provinsi Maluku periode 2017-2021 maka dilakukan dengan empat indikator yang dijadikan sebagai rasio analisis keuangan daerah Provinsi Maluku, yaitu:

1. Rasio derajat desentralisasi
2. Rasio Kemandirian
3. Rasio efektivitas dan efisiensi
4. Rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung

Empat indikator tersebut dianalisis dengan pendekatan rumus untuk melihat kemampuan/kualitas kinerja keuangan Provinsi Maluku dalam mengelola keuangan daerah periode 2017-2021.

1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung sesuai dengan perbandingan/penjumlahan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi makin tinggi.

2. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat daerahnya (Halim, 2008:232). Rasio kemandirian dihitung dengan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman. Berikut ini rumus Rasio Kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta kemandirian pemerintah daerah mengelola keuangan daerah.

Pola hubungan, kemandirian daerah dan kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan	Rasio kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007)

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini rumus hitungan rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas	Keterangan
Tidak Efektif	X<100%
Efektif Berimbang	X=100%
Efektif	X>100%

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan/memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$$

Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien	X>100%
Efisien Berimbang	X=100%
Efisien	X<100%

4. Rasio Belanja Langsung dan Rasio Belanja Tidak Langsung

Rasio belanja langsung dan tidak langsung digunakan sebagai ukuran menganalisis pemanfaatan keuangan daerah berkaitan dengan pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (Mahmudi, 2010). Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah kegiatan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan aktivitas pemerintah daerah. Sedangkan belanja tidak langsung adalah kegiatan pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan daerah.

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja} =$$

$$\frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Total Belanja Daerah

Rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung digunakan untuk mengukur biaya pengeluaran pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017-2021”, menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Dan pengambilan data sesuai periode 2017-2021 di sebelas kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Berikut ini sebelas kabupaten/kota yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini yaitu:

1. Kota Ambon
2. Kota Tual
3. Kabupaten Maluku Tengah
4. Kabupaten Seram Bagian Barat
5. Kabupaten Seram Bagian Timur
6. Kabupaten Buru Selatan
7. Kabupaten Buru
8. Kabupaten Maluku Tenggara
9. Kabupaten Kepulauan Aru
10. Kabupaten Tanimbar
11. Kabupaten Maluku Barat Daya

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017-2021 dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Tujuannya mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat sesuai dengan data sekunder yang dihimpun. Data tersebut kemudian diolah sesuai dengan rumus analisis yaitu: rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi serta rasio belanja langsung dan rasio belanja tidak langsung. Data sekunder tersebut diolah menjadi data yang disajikan sesuai rasio analisis keuangan Provinsi Maluku.

Data realisasi APBD kabupaten/kota Provinsi Maluku (DJPK) dijadikan sebagai sampel analisis keuangan dengan perbandingan antara tahun 2017-2021 kabupaten/kota. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari DJPK yang diambil berdasarkan periode 2017-2021 kabupaten/kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Maluku adalah Provinsi tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1958 berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1958. Provinsi Maluku terletak dibagian

selatan Kepulauan Maluku dengan potensi alam yang melimpah. Secara geografis Provinsi Maluku berbatasan dengan Laut Seram disebelah utara, Samudera Hindia dan Laut

Arafura dibagian selatan. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Papua Barat dan Laut Banda dibagian barat.

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 1
Perbandingan antara jumlah PAD dengan Total Pendapatan Daerah 2017-2021

Kabupaten/Kota	PAD	Total Pendapatamn Daerah	Derajat (%)	Keterangan
Kota Ambon 2017	139.372.008.189	1.133.151.627.557	12,3	Rendah
Kota Ambon 2018	154.973.387.894	1.136.376.523.204	13,64	Rendah
Kota Ambon 2019	81.815.577.265	618.667.052.202	13,22	Rendah
Kota Ambon 2020	56.095.400.899	604.312.802.279	9,28	Sangat Rendah
Kota Ambon 2021	64.846.830.854,86	463.501.153.635,86	13,99	Rendah
Kab. Tanimbar 2017	27.382.859.759	907.927.111.407	3,02	Sangat Rendah
Kab. Tanimbar 2018	40.443.615.590	847.720.604.094	4,77	Sanga Rendah
Kab. Tanimbar 2019	11.708.274.894	1.263.047.334.897	0,93	Sangat Rendah
Kab. Tanimbar 2020	8.145.019.226	417.529.261.321	1,95	Sangat Rendah
Kab. Tanimbar 2021	9.641.886.863,75	395.446.254.592,75	2,44	Sangat Rendah
Kab. Malra 2017	47.182.950.769	978.560.939.218	4,82	Sangat Rendah
Kab. Malra 2018	55.136.774.870	918.377.384.386	6	Sangat Rendah
Kab. Malra 2019	19.818.279.419	473.166.551.633	4,19	Sangat Rendah
Kab. Malra 2020	16.417.640.240	354.473.661.615	4,63	Sangat Rendah
Kab. Malra 2021	17.599.935.124,53	376.548.835.183,53	4,67	Sangat Rendah
Kab. Malteng 2017	66.958.583.664	1.623.326.798.903	4,12	Sangat Rendah
Kab. Malteng 2018	59.820.016.826	1.622.330.833.344	3,69	Sangat Rendah
Kab. Malteng 2019	24.546.772.645	817.608.701.736	3	Sangat Rendah
Kab. Malteng 2020	22.894.756.405	648.791.601.172	3,53	Sangat Rendah
Kab. Malteng 2021	24.820.859.808,46	720.770.626.489,46	3,44	Sangat Rendah
Kab. Bursel 2017	12.999.589.247	605.625.487.281	2,15	Sangat Rendah
Kab. Bursel 2018	15.506.213.191	761.334.889.582	2,04	Sangat Rendah
Kab. Bursel 2019	4.983.875.452	297.097.408.556	1,68	Sangat Rendah
Kab. Bursel 2020	11.807.798.854	562.295.456.878	2,1	Sangat Rendah
Kab. Bursel 2021	14.268.674.742,36	312.369.756.109,36	4,57	Sangat Rendah
Kota Tual 2017	29.342.794.616	643.585.561.910	4,56	Sangat Rendah
Kota Tual 2018	19.109.294.060	589.336.239.356	3,24	Sangat Rendah
Kota Tual 2019	1.171.556.658	49.298.080.308	2,38	Sangat Rendah
Kota Tual 2020	7.034.507.142	258.618.261.765	2,72	Sangat Rendah
Kota Tual 2021	7.947.691.663,90	247.865.455.418,90	3,21	Sangat Rendah
Kab. Buru 2017	39.973.487.646	794.529.154.762	5,03	Sangat Rendah
Kab. Buru 2018	46.257.089.676	887.002.382.615	5,21	Sangat Rendah
Kab. Buru 2019	5.945.079.721	437.490.161.498	1,36	Sangat Rendah
Kab. Bur 2020	10.460.185.221	389.784.809.116	2,68	Sangat Rendah
Kab. Buru 2021	9.579.946.060,31	360.022.227.573,31	2,66	Sangat Rendah
Kab. Aru 2017	43.525.983.087	948.283.736.625	4,59	Sangat Rendah
Kab. Aru 2018	59.274.150.040	998.893.975.855	5,93	Sangat Rendah
Kab. Aru 2019	8.526.426.374	307.472.545.259	2,77	Sangat Rendah
Kab. Aru 2020	8.947.775.375	328.143.423.925	2,73	Sangat Rendah
Kab. Aru 2021	10.776.177.750,70	311.478.323.933,70	3,46	Sangat Rendah
Kab. SBT 2017	20.691.996.202	1.031.283.290.040	2,01	Sangat Rendah
Kab. SBT 2018	24.483.710.263	927.190.103.232	2,64	Sangat Rendah
Kab. SBT 2019	164.975.209	255.376.569.809	0,06	Sangat Rendah
Kab. SBT 2020	1.989.137.933	298.819.421.627	0,67	Sangat Rendah
Kab. SBT 2021	10.333.861.455,73	328.209.614.578,73	3,15	Sangat Rendah
Kab. SBB 2017	18.864.607.657	941.306.675.349	2	Sangat Rendah
Kab. SBB 2018	23.233.152.017	1.013.832.506.867	2,29	Sangat Rendah
Kab. SBB 2019	10.067.254.121	469.982.643.818	2,14	Sangat Rendah
Kab. SBB 2020	10.999.062.188	411.668.840.124	2,67	Sangat Rendah
Kab. SBB 2021	13.223.782.512,70	359.649.419.505,70	3,68	Sangat Rendah
Kab. MBD 2017	49.763.939.793	995.609.326.719	5	Sangat Rendah
Kab. MBD 2018	49.399.756.084	826.551.006.773	5,98	Sangat Rendah
Kab. MBD 2019	12.687.791.244	461.986.232.359	2,75	Sangat Rendah
Kab. MBD 2020	10.861.890.339	406.533.799.923	2,67	Sangat Rendah
Kab. MBD 2021	16.347.768.954,85	368.343.511.449,85	4,44	Sangat Rendah

Sumber: Data diolah (DJPK) 2017-2021

Tabel diatas menggambarkan bahwa rasio desentralisasi pada sebelas kabupaten/kota Provinsi Maluku pada tahun 2017-2021 tidak signifikan peningkatannya. Dari hitungan perbandingan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Belanja Daerah sebelas kabupaten kota Provinsi Maluku memperlihatkan

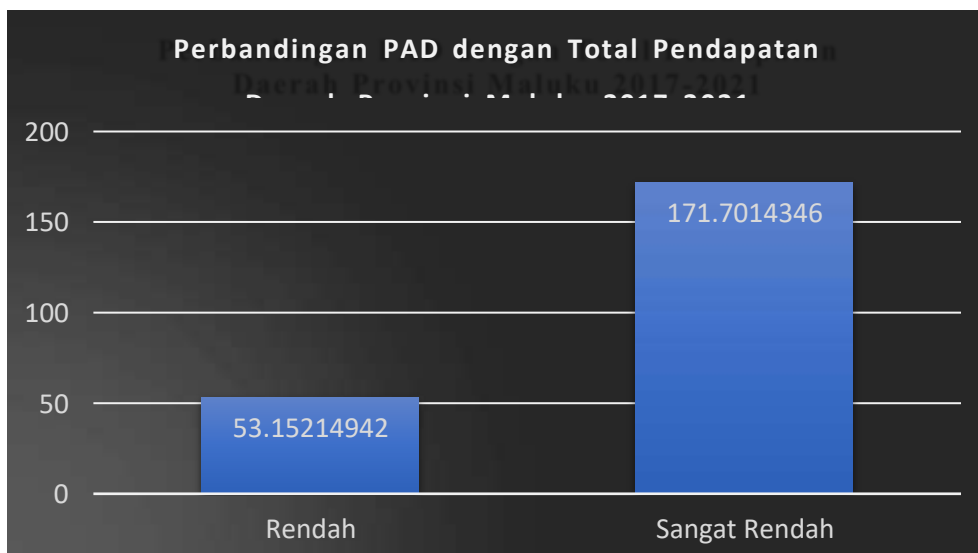
kemampuan Provinsi Maluku jauh dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah. Kota Ambon dikategorikan kota dengan presentase rasio derajat desentralisasi dengan kategori rendah, dan tahun 2020 Kota Ambon masuk kategori sangat rendah dengan jumlah sebesar 9,28 persen. Kota Ambon pada tahun 2017 rasio derajat desentralisasi sebesar 12,30% dan meningkat menjadi 13,64% pada 2018. Tahun 2019 turun kembali menjadi 13,22% dan turun lagi di 2020 sebesar 9,28%. Sedangkan 2021 meningkat sebesar 13,99%. Selain Kota Ambon, sepuluh kabupaten/kota yang lain dikategorikan sangat rendah, dengan menunjukkan jumlah (%) dibawah 10,00% berarti sangat rendah. Artinya bahwa Provinsi Maluku belum sepenuhnya mandiri menjalankan keuangan daerah.

Jika dihitung total nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi tahun 2017-2021 Provinsi Maluku adalah sebesar 4,09% dari total sebelas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku. Dan dikategorikan Provinsi Maluku dengan presentase sangat rendah (Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996). Mahmudi (2016) semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Data ini menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total Penerimaan Daerah.

Berikut adalah grafik perbandingan rasio desentralisasi Provinsi Maluku pada tahun 2017-2021 dengan menampilkan presentase kategori rendah dan sangat rendah. Dengan begitu dapat dilihat dalam rentan waktu 2017-2021, apakah Provinsi Maluku masuk ke dalam Provinsi yang mandiri menjalankan keuangan daerah, ataukah masih rendah menjalankan desentralisasi fiskal.

Grafik 1

Perbandingan PAD dan Total Pendapatan Daerah 2017-2021



Brown (1993) dalam Andayani (2007, h.254), mengukur kondisi keuangan daerah menggunakan analisa rasio kemandirian keuangan daerah untuk mengetahui kondisi keuangan yang terjadi pada daerah tersebut. Berikut ini tabel rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Maluku tahun 2017-2021.

Dari grafik yang ditampilkan diatas rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi di Kota Ambon sebesar 16,77%. Rasio ini menunjukkan bahwa keseluruhan kabupaten/kota Provinsi Maluku sifatnya instruktif. Karena dari sebelas kabupaten/kota yang ada di Maluku, Kota Ambon pada 2021 naik rasio kemandirian sebesar 16,77% dan masuk kategori kemampuan keuangan rendah sekali. Sesuai analisis rasio kemandirian bahwa dibawah 25% berarti rendah sekali dan pola hubungannya isntruktif. Dengan demikian pola hubungan dengan Provinsi Maluku dengan pemerintah pusat menunjukkan ketergantungan yang tinggi. Sedangkan kabupaten lain seperti Kabupaten Aru, Tanimbar, Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kota Tual, Buru, Buru Selatan dan Maluku Tenggara kategori kemampuan keuangan rendah sekali dan sifatnya isntruktif. Sepuluh kabupaten/kota ini, selain Ambon, kemampuan keuangan daerah sangat mengkhawatirkan. Tampilan data pada grafik diatas dengan presentase terendah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 0,06% pada tahun 2020.

Dengan demikian, rasio kemandirian Provinsi Maluku dengan kemampuan keuangan sangat rendah dan pola hubungan dengan pemerintah pusat sifatnya isntruktif. Artinya Provinsi Maluku masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat.

3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan target penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang disajikan di tabel dibawah ini bahwa sebelas kabupaten/kota Provinsi Maluku, Kota Ambon dengan tahun 2017-2018 masuk dalam kategori efektif berimbang dengan jumlah (%) sebesar 105,09% di tahun 2017, sedangkan 2018 mencapai 108,13%, terjadi kenaikan tahun 2017 ke 2018. Sedangkan 2019-2021 terjadi penurunan dari 108,13% ke 44,72%, 28,73% dan 34,12%. Dari hasil yang ada menunjukkan bahwa Kota Ambon hanya terjadinya efektivitas keuangan daerah yang berimbang pada 2017-2018, yang lainnya kurang efektif.

Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2017 mencapai 120,21% dan tahun 2018 104,69% menunjukkan efektif berimbang, sedangkan tahun 2019-2021 tidak efektif kinerja keuangannya. Kabupaten Maluku Tengah 2017 mencapai 102,46% dikategorikan kinerja keuangan yang efektif berimbang, 2018-2021 tidak efektif keuangan daerahnya. Kota Tual periode 2017 sesuai data di tabel dibawah ini masuk dalam kategori efektif berimbang, dengan presentase 133,92%, sedangkan tahun 2018-2021 tidak efektif.

Tabel 2

Rasio efektivitas Provinsi Maluku 2017-2021

Tahun	Kabupaten/Kota	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas (%)
2017	Kota Ambon	139.372.008.189	132.624.717.504	105,09
2018	Kota Ambon	154.973.387.894	143.323.440.498	108,13
2019	Kota Ambon	81.815.577.265	182.952.217.679	44,72
2020	Kota Ambon	56.095.400.899	195.230.435.423	28,73
2021	Kota Ambon	64.846.830.854,86	190.056.780.701,00	34,12
2017	Kab. Tanimbar	27.382.859.759	49.549.140.402	55,26
2018	Kab. Tanimbar	40.443.615.590	74.785.912.687	54,08
2019	Kab. Tanimbar	11.708.274.894	74.457.799.138	15,72
2020	Kab. Tanimbar	8.145.019.226	49.855.917.329	16,34
2021	Kab. Tanimbar	9.641.886.863,75	60.016.598.296,00	16,07
2017	Kab. Malra	47.182.950.769	39.250.900.941	120,21
2018	Kab. Malra	55.136.774.870	52.665.882.941	104,69
2019	Kab. Malra	19.818.279.419	50.582.324.544	39,18
2020	Kab. Malra	16.417.640.240	55.114.847.000	29,79
2021	Kab. Malra	17.599.935.124,53	66.278.122.059,26	26,55
2017	Kab. Malteng	66.958.583.664	65.348.970.000	102,46
2018	Kab. Malteng	59.820.016.826	92.014.784.000	65,01
2019	Kab. Maleng	24.546.772.645	79.566.758.000	30,85
2020	Kab. Malteng	22.894.756.405	83.302.557.000	27,48
2021	Kab. Malteng	24.820.859.808,46	86.638.537.000,00	28,65
2017	Kab. Bursel	12.999.589.247	13.320.405.000	97,59
2018	Kab. Bursel	15.506.213.191	16.809.300.000	92,25
2019	Kab. Bursel	4.983.875.452	21.217.105.000	23,49
2020	Kab. Bursel	11.807.798.854	32.285.295.000	36,57
2021	Kab. Bursel	14.268.674.742,36	27.916.583.000,00	51,11
2017	Kota Tual	29.342.794.616	21.911.322.661	133,92
2018	Kota Tual	19.109.294.060	32.528.688.226	58,75
2019	Kota Tual	1.171.556.658	36.157.380.226	3,24
2020	Kota Tual	7.034.507.142	30.497.219.500	23,07
2021	Kota Tual	7.947.691.663,90	32.004.652.800,00	24,83
2017	Kab. Buru	39.973.487.646	27.687.187.870	144,38
2018	Kab. Buru	46.257.089.676	50.283.723.969	91,99
2019	Kab. Buru	5.945.079.721	50.257.663.171	11,83
2020	Kab. Buru	10.460.185.221	60.787.638.171	17,21
2021	Kab. Buru	9.579.946.060,31	45.790.093.501,00	20,92
2017	Kab. Aru	43.525.983.087	60.420.000.000	72,04
2018	Kab. Aru	59.274.150.040	68.960.000.000	85,95
2019	Kab. Aru	8.526.426.374	166.133.255.802	5,13
2020	Kab. Aru	8.947.775.375	122.908.491.162	7,28
2021	Kab. Aru	10.776.177.750,70	116.008.823.026,00	9,29
2017	Kab. SBT	20.691.996.202	15.084.669.288	137,17
2018	Kab. SBT	24.483.710.263	27.659.669.288	88,52
2019	Kab. SBT	164.975.209	35.679.632.850	0,46
2020	Kab. SBT	1.989.137.933	23.161.146.275	8,59
2021	Kab. SBT	10.333.861.455,73	16888233572	61,19
2017	Kab. SBB	18.864.607.657	30.682.244.787	61,48
2018	Kab. SBB	23.233.152.017	40.137.162.094	57,88
2019	Kab. SBB	10.067.254.121	30.000.000.000	33,56
2020	Kab. SBB	10.999.062.188	35.680.907.869	30,83
2021	Kab. SBB	13.223.782.512,70	41.453.316.000,00	31,90
2017	Kab. MBD	49.763.939.793	51.012.788.658	97,55
2018	Kab. MBD	49.399.756.084	66.566.488.695	74,21
2019	Kab. MBD	12.687.791.244	81.978.771.788	15,48
2020	Kab. MBD	10.861.890.339	147.655.112.606	7,36
2021	Kab. MBD	16.347.768.954,85	99.777.682.132,00	16,38

Sumber: Data diolah (DJPK) 2017-2021

Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2017 termasuk dalam kategori keuangan efektif berimbang, dengan angka 2017 Kabupaten Buru sebesar 144,38% dan Kabupaten Seram Bagian Timur 137,13%. Kabupaten/kota lainnya masih rendah kinerja keuangannya, dan dikategorikan kinerja keuangan yang tidak efektif. Analisis ini berdasarkan data yang disajikan di tabel diatas dengan menggunakan rumus rasio efektivitas keuangan daerah. Dengan hitungannya, jika $X < 100\%$ berarti tidak efektif, $X = 100\%$ berarti efektif berimbang dan $X > 100\%$

hubungan pemerintah pusat bersifat instruktif, artinya Provinsi Maluku mengandalkan bantuan pemerintah pusat dalam pembangunan di Provinsi Maluku.

3. Analisis rasio efektivitas keuangan Provinsi Maluku ditemukan empat kabupaten/kota dengan tahun 2017 masuk ke dalam efektivitas berimbang, dan tahun lainnya tidak efektif kinerja keuangan daerah Maluku. Dan kabupaten/kota lainnya dikategorikan daerah yang tidak efektif keuangan daerahnya.

4. Sedangkan rasio aktivitas kecenderungan daerah Provinsi Maluku pada belanja tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurbaida, 2019, *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2008-2018*. Jurnal SOSOQ Vol.7 No.1
- Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas, 2014, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.14 No.2
- Oesi Agustina. A, 2013, *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*.
- Hidayat. S. 2008. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State- Society Relation*. Jurnal Politik, Vol. 1. Universitas Nasional. Jakarta.
- Hery Susanto, 2019, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. Jurnal ilmu manajemen dan bisnis, Vol.7, No.1
- Novira Sartika, *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti*. Jurnal Inovasi Bisnis.
- Agus Adi Pratama Putra, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, 2017, *Kinerja Keuangan Daerah Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.19.2.
- Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid, *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2 No.2

Siti Fatimah, 2017, *Analisis Dana Perimbangan Kaitannya Dengan Percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2016*. Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 3, No.2

Siti Fatimah, Tuty Handayani, 2021, *Analisis Pertumbuhan Dan Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Product Domestic Regional Brutto (Pdrb) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016-2019*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 7, No.2

Mahmuddin Siregar. 2019, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimediasi Dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah*. Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, Vol 2 No. 2.

Arif Budianto, 2020, *Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020*.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 2017-2021